REFORMULASI PENGATURAN JANGKA WAKTU PIDANA KURUNGAN SUBSIDER PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : *Osshy Sari Sukma*

Pembimbing I : *Dr. Dessy Artina, S.H., M.H*

Pembimbing II : *Elmayanti, S.H., M.H*

Alamat: *Jalan Gelugur Ujung. Gang Kandis, Nomor.17, Pekanbaru-Riau*

Email: *ossy.sari@yahoo.com*

In court judgment of corruption, there is often a lack of uniformity of court judgment regarding the term of criminal confinement in lieu of criminal fines. While the nominal criminal penalties on these court judgment are exactly the same. This certainly harms the right of the convicted person to obtain justice, legal certainty and equality before the law. The purpose of this thesis is; first, to find out the time limit for the confinement of the criminal confinement subsidiary fines in the case of corruption in positive Indonesian law. Second, to find out the reformulation of the term of criminal confinement as substitute of criminal fines in corruption cases.

The type of research used in this legal research is normative juridical method, with the study of legal principles namely the principle of legal certainty. This research is descriptive in nature, which is a study that aims to make a clear and detailed picture of the problem. The data source used is secondary data. Data collection techniques in this study with a literature review method after the data collected and then analyzed to draw conclusions.

From the results of research and discussion, it is known that, First, there are no definite limits regarding the term of confinement in lieu of criminal fines in cases of corruption in positive Indonesian law. The limitation regarding the period of confinement in lieu of fines is not contained in Law Number 20 of 2001 Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. Limitation on the period of confinement in lieu of fines is only regulated in the Criminal Code which is a general rule. While the nominal of criminal penalties in the Criminal Code although it has been converted by PERMA Number 2 of 2012 is too smaller than the nominal of fines that are threatened in corruption cases , so it cannot be used as a guideline. Secondly, the expected reformulation is the rule regarding the period of confinement in lieu of fines in the criminal act of corruption which was only guided by the Criminal Code which is a general rule, become updated with the term of the limitation of the period of confinement for a substitute fine specifically in the Act on Eradication of Acts Criminal Corruption. In order to have clear guidelines so as to create court judgment that meet the value of justice, and legal certainty and uniformity of court judgment between convicts who are sentenced to a fine with the same nominal. The author's suggestion, First, to minimize the inconsistency of court judgement, the government must immediately update the rules regarding the period of imprisonment as a substitute for criminal imprisonment in corruption cases. Second, the renewal of the rules regarding the limit of criminal time must be carried out accompanied by synchronization of the nominal fines threatened in the Corruption Eradication Law, so that these limits can actually be used as definite guidelines.

Keywords: Reformulation - criminal confinement - Criminal Fines - Corruption

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam putusan pengadilan pada perkara tindak pidana korupsi, pada umumnya dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif. Dimana jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan.¹ Tidak terdapat pengaturan mengenai pidana kurungan sebagai pidana pengganti (subsider) denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana kurungan sebagai subsider denda diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan jika denda tidak dibayar, lalu diganti pidana kurungan. Dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP diatur bahwa lamanya kurungan pengganti paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan. Kemudian dalam Pasal 30 ayat (4) diatur jika denda 7 rupiah 50 sen maka dihitung 1 hari, dan jika lebih dari 7 rupiah 50 sen, tiap-tiap 7 rupiah 50 sen dihitung 1 hari.

Walaupun telah dikonversikan menurut aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 yakni dengan dikalikan 1000, ketentuan dalam Pasal 30 KUHP mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda tersebut tetap tidak dapat mengakomodir pidana denda dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan jumlah denda pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jauh lebih besar dibandingkan tindak pidana umum di dalam KUHP. Dengan demikian pada akhirnya menyebabkan ketidakseragaman dalam penentuan masa kurungan subsider denda pada tindak pidana korupsi.

Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa perbandingan putusan berikut:

Tabel. I.1
Ketidakteragaman Putusan mengenai
jangka waktu pidana kurungan
pengganti denda dalam perkara tindak
pidana korupsi

No	Nomor Putusan	Jumlah Pidana Denda (Rp)	Jangka Waktu Pidana Kurungan
1	50/Pid.S us- TPK/20 18/PN.S by	50.000.000	1 bulan
	130/Pid. Sus- TPK/20 18/PN.S by		2 bulan
2	32/Pid.S us- TPK/20 19/PN.P br	50.000.000	3 bulan
	134/Pid. Sus- TPK/20 19/PN.S by		6 bulan
3	16/Pid.S us- TPK/20 17/PN. Dps	100.000.000	2 bulan
	4/Pid.Su s- TPK/20 16/PN. Dps		3 bulan
4	32/Pid.S us- TPK/20 19/PN. Mtr	200.000.000	1 bulan

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 123.

	26/Pid.S us- TPK/20 19/PN.P dg		2 bulan
5	1/Pid.Su s- TPK/20 17/PN. Dps	200.000.000	3 bulan
	5/Pid.Su s/TPK/2 019/PN. Pdg		5 bulan
6	37/Pid.S us- TPK/20 19/PN.P br	300.000.000	1 bulan
	54/Pid.S us- TPK/20 18/PN.S mg		4 bulan
7	16/Pid.T PK/201 4/PT.Bd g	300.000.000	2 bulan
	4/Pid.Su s- TPK/20 17/PT.A mb		6 bulan

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses melalui <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Pembaharuan hukum pidana mengenai pengaturan jangka waktu pidana kurungan subsider pidana denda dalam tindak pidana korupsi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan ketidakpastian hukum yang menyebabkan tidak seragamnya putusan mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana korupsi tidak dapat

dibiarkan terjadi secara terus-menerus. Selain itu, pembaharuan hukum pidana mengenai pengaturan jangka waktu pidana kurungan subsider pidana denda juga penting dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan persamaan di muka hukum, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1). Tidak adanya keseragaman putusan mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana korupsi, mencerminkan tidak dipenuhinya hak terpidana untuk mendapatkan hak atas kepastian hukum dan hak atas persamaan di muka hukum sebagaimana diakui oleh Konstitusi. Tentunya pembaharuan hukum pidana, senyatanya harus menjadi tonggak dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan perbuatan pidana.²

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Reformulasi Pengaturan Jangka Waktu Pidana Kurungan Subsider Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi**”.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah batasan jangka waktu pidana kurungan subsider pidana denda pada perkara Tindak Pidana Korupsi dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah reformulasi batasan jangka waktu pidana kurungan subsider denda pada perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batasan jangka waktu pidana kurungan subsider denda dalam tindak

² Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru, 2012, hlm 162

pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia.

2. Untuk mengetahui reformulasi batasan jangka waktu pidana kurungan subsider denda dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum
2. Sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap almamater dan menambah khasanah pengetahuan mengenai pentingnya Reformulasi Pengaturan Jangka Waktu Pidana Kurungan Subsider Denda dalam Tindak Pidana Korupsi.
3. Sebagai masukan pemikiran kepada lembaga legislatif sebagai pembuat peraturan mengenai pentingnya Reformulasi Pengaturan Jangka Waktu Pidana Kurungan Subsider Denda dalam Tindak Pidana Korupsi.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Hukum erat kaitannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, hukum bersifat objektif

berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang mudah.³

Aristoteles berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.⁴ Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun ia membagi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip semua orang sederajat di mata hukum. Sedangkan kesamaan proporsional melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya. Selain model keadilan berbasis kesamaan, Aristoteles juga mengajukan model keadilan lain, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif.⁵

Keadilan distributif indentik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional.⁶ Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian yang adil dalam hubungan antara masyarakat dan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.⁷ Keadilan ini tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, jadi bukan persamaan, melainkan kesebandingan.⁸

Menurut Aristoteles, yang setara harus diperlakukan setara dan yang tidak setara diperlakukan tidak setara.⁹ Ia menghendaki agar orang-orang yang

³ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Prenada Media, Jakarta 2012, hlm 91

⁴ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 23

⁵ Bernard. L Tanya, et. al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 45

⁶ *Ibid.*

⁷ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri*, Vol 11 No.2, Januari 2011 hlm 7

⁸ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 30.

⁹ Raanan Gillon, "Philosophical Medichal Ethics: Justice and Medical Ethics", *British Medical Journal*,

mempunyai kedudukan sama memperoleh kedudukan yang sama pula dihadapan hukum.¹⁰

Keadilan korektif (remedial), berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman sepantasnya perlu diberikan kepada pelaku. Singkatnya keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif merupakan standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari perbuatan, tanpa memandang siapa pelakunya.¹¹ Sanksi pidana yang dijatuhkan memulihkan yang telah dilakukan oleh kejahatan dan ganti rugi telah memulihkan kesalahan perdata. Standar tersebut diterapkan tanpa membeda-bedakan orang.¹²

2. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum berasal dari dua kata yaitu pembaharuan dan hukum. Pembaruan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membarui. Membarui berarti; memperbaiki supaya menjadi baru, mengulangi sekali lagi, memulai lagi, dan bisa berarti mengganti yang baru, memodernkan. Menurut Satjipto Rahardjo istilah lain pembaharuan hukum adalah pembangunan hukum, perubahan hukum, pembinaan hukum, atau modernisasi hukum.¹³

Pembaharuan hukum dalam pandangan Satjipto Rahardjo didasarkan pada

hakikat dari hukum itu sendiri sebagai peraturan yang berlakunya harus memenuhi persyaratan filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, hukum harus sesuai dengan sistem, teori, asas, fungsi, dan tujuan hukum. Secara politis, hukum merupakan buatan dari pemerintahan negara yang merdeka. Secara yuridis, pembuatan atau pembentukannya memenuhi prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan serta tata urutan perundang-undangan. Secara sosiologis, hukum itu muncul dari aspirasi masyarakat sehingga diterima dan berlakunya hukum diterima dan dipatuhi masyarakat¹⁴.

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan.¹⁵ Dalam upaya melakukan pembaruan hukum pidana nasional, perlu dilakukan pengkajian dan penggalian nilai-nilai nasional yang bersumber pada Pancasila dan yang bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Maka seyogyanya pembaruan hukum pidana itu harus dilatarbelakangi oleh ide dasar dari Pancasila yang didalamnya mengandung keseimbangan nilai; moral

Imperial College of Science and Technology, London SW7 INA, Vol. 291, 20 Juli 1985, hlm 201, diakses melalui <https://scholar.google.com>, tanggal 18 November 2019 diterjemahkan oleh google translate.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adita Bakti, Bandung, 2014, hlm 274.

¹¹ Bernard. L Tanya, et. al., *Loc. Cit*

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 283.

¹³ Jayus, *Hukum Pemilu dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Jakad Publishing, Surabaya, 2019, hlm 113.

¹⁴ Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm 64

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm 29.

religious (ketuhanan), kemanusiaan (humanistik), kebangsaan, demokrasi, serta keadilan sosial.¹⁶

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum pidana, politik criminal dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Reformulasi adalah perumusan ulang,¹⁸ atau memformat ulang terhadap keadaan atau apapun yang ada, karena jauh dari ideal.¹⁹
2. Pidana Kurungan adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga masyarakat, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga masyarakat, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 36

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, tanggal 20 November 2019

¹⁹ Syafrianda, "Reformulasi Sanksi Pidana Terhadap Perusahaan yang Tidak Melakukan Penerapan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2018, hlm 19

tersebut.²⁰ Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada terpidana yang dijatuhi pidana penjara.²¹

3. Subsider adalah sebagai pengganti sesuatu apabila suatu hal tidak terjadi. Hukuman kurungan subsider adalah hukuman kurungan sebagai pengganti hukum denda apabila terhukum tidak memayarnya.²²
4. Pidana Denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan pembayaran uang sejumlah tertentu.²³
5. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu metode *yuridis normatif*, dengan *kajian asas-asas hukum* yaitu asas kepastian hukum. Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci. Sumber data yang digunakan adalah *data sekunder*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan *metode kajian kepustakaan* setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

²⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 70.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 198.

²² Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 103

²³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 104

²⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari ;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁵

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ialah melalui literatur-literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode ini digunakan dalam

kategori penelitian hukum normatif untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) akan dianalisis secara kualitatif. Yaitu analisis hasil studi kepustakaan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Hasil studi kepustakaan dianalisis menggunakan teori-teori hukum dan diuraikan dalam bentuk kalimat.

Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis adalah metode berfikir *deduktif*. Metode berfikir *deduktif* ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai pidana dan pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Kata pidana atau hukuman itu dalam bahasa latin disebut *poena* atau *penal*, dalam bahasa inggris disebut *punishment* atau *sentence* atau *penalty* dan dalam bahasa Belanda *Straf*. Namun dalam literatur umumnya dipergunakan kata *punishment* atau *straf*. Memberi pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pidana bukan masalah yang mudah, karena sudut pandang yang dipergunakan untuk mendefinisikan kata "pidana" tersebut tidak sama.²⁶

Roeslan Saleh memberikan pengertian pidana sebagai reaksi atas

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 119

²⁶ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm 135

delik, dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁷ Sementara Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁸

2. Tujuan Pidana

Menurut M. Arief Setiawan, secara umum tujuan pidana mempunyai tujuan ganda, yaitu:²⁹

1. Tujuan Perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi Adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai, dan
2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pidana bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

3. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi seorang terpidana diatur di dalam ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok
Yang terdiri dari:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
Yang terdiri dari:
 - 1). Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2). Perampasan barang-barang tertentu

- 3). Pengumuman putusan hakim

4. Pemidanaan

Menurut Andi Hamzah pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Andi Hamzah mengaskan bahwa pemidanaan ini mempunyai dua arti, yaitu;

- a. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto).
- b. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Sedangkan menurut Oemar Senoadjie dan Karim Nasution, pemidanaan adalah merupakan konkretisasi atau realisasi dari peraturan pidana dalam Undang-Undang yang masih merupakan sesuatu yang abstrak.³⁰

B. Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.³¹ Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

²⁷ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm 77

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, hlm 186

²⁹ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm 101.

³⁰ Tolib Setiady, *Op.Cit.*, hlm 21-22

³¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 15

Pidana Korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Yang termasuk kedalam unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi adalah:³²

- 1) Setiap orang termasuk korporasi
- 2) Melakukan perbuatan melawan hukum
- 3) Memperkaya diri sendiri
- 4) Merugikan keuangan Negara

3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Yang menjadi subjek hukum dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) Korporasi
- 2) Pegawai Negeri
- 3) Setiap orang

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh), yaitu:

- i). kerugian keuangan negara;
- ii). suap-menyuap;
- iii). penggelapan dalam jabatan;
- iv). pemerasan;
- v). perbuatan curang;
- vi). benturan kepentingan dalam pengadaan;

vii). gratifikasi.

C. Tinjauan umum mengenai pidana denda

1. Pengertian Pidana denda

Hukuman utama keempat yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana denda. Pidana Denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum sebagai penebus dosa dengan pembayaran uang sejumlah tertentu.³³

2. Pidana Denda dalam Sistem Pidana Indonesia

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.³⁴ Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP adalah tiga puluh rupiah tujuh puluh lima sen. Apabila terpidana tidak membayarkan uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani pidana kurungan.³⁵ Pidana kurungan sebagai pengganti denda diatur di dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP.

D. Pidana Kurungan Pengganti Denda

1. Pengertian Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan

³²Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 17

³³ Tolib Setiady, *Loc. Cit*

³⁴ Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 70.

³⁵ *Ibid.*

dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana telah diatur di dalam Buku ke-III Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana atau *als principale* ataupun sebagai pengganti atau *als vervangende* dari pidana denda.³⁶

2. Pidana Kurungan Pengganti Denda

Dasar hukum pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda ialah pada Pasal 30 KUHP pada Ayat (1-6) yakni sebagai berikut :

- (1). Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2). Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3). Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4). Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima

puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

- (5). Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6). Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Jangka Waktu Pidana Kurungan Subsider Pidana Denda pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia

Ketidakteraturan mengenai jangka waktupidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana korupsi wajar terjadi, karena tidak terdapat pedoman yang jelas bagi hakim dalam menentukan jangka waktu atau masa pidana kurungan pengganti pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat batasan-batasan jangka waktu pidana kurungan pengganti denda. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat batasan jangka waktu pidana penjara pengganti pidana tambahan uang pengganti. Sedangkan pidana pengganti sendiri berbeda dengan pidana denda.³⁷

Setelah diamati, dalam hukum pidana positif Indonesia tidak terdapat batasan mengenai jangka waktu pidana kurungan

³⁶ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 70-71.

³⁷ Agung Satria Palguna, dan I Gusti Ketut Ariawan, "Analisis Yuridis Pembebanan Uang

Pengganti Terhadap Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 4 Agustus 2018, hlm 6.

pengganti pidana denda yang dapat dijadikan pedoman yang pasti untuk menentukan jangka waktu pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana korupsi. Bahkan produk hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur batasan-batasan tersebut tidak ditemukan. Padahal perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dengan angka perkara tertinggi.³⁸

Batas-batas yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak dapat digunakan dalam memutuskan jangka waktu pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana korupsi, dikarenakan jumlah denda yang terdapat pada KUHP jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah denda pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 30 Ayat (4) diatur batasan masa pidana kurungan pengganti denda yakni setiap 7 (tujuh) rupiah 50 (lima puluh sen) dihitung 1 (satu) hari kurungan pengganti. Di mana walaupun telah dilakukan penyesuaian oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 1000 kali, aturan mengenai batasan jangka waktu pidana kurungan pengganti pidana denda dalam KUHP tidak mampu mengakomodir jumlah denda dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan nominal denda dalam KUHP jauh lebih kecil dibandingkan nominal denda pada perkara tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan nominal pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sementara aturan pidana kurungan pengganti denda dalam KUHP walaupun

sudah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 hanya berjumlah Rp.7500/per hari. Sehingga pada akhirnya tidak terdapat kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi hakim untuk menentukan jangka waktu atau masa pidana kurungan pengganti denda bagi terpidana perkara tindak pidana korupsi.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles, yang menyatakan bahwa keadilan adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Tidak terdapatnya batasan yang jelas dan pasti mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi tidak memenuhi keadilan. Hal tersebut dikarenakan aturan yang tidak pasti menyebabkan ketidakseragaman putusan diantara para terpidana dengan putusan nominal pidana denda yang sama. Dimana ketidakseragaman putusan tersebut mencerminkan bahwa para terpidana tidak mendapatkan haknya yaitu hak atas persamaan di muka hukum dan hak atas kepastian hukum. Dimana hak tersebut diakui oleh konstitusi pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1). Hal ini berarti aturan yang ada mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti pidana tidak mampu memberikan keadilan bagi terpidana karena tidak menjamin terpenuhinya hak terpidana untuk mendapatkan kepastian hukum dan persamaan di muka hukum.

B. Reformulasi Batasan Jangka Waktu Pidana Kurungan Subsider Pidana Denda

Reformulasi adalah perumusan ulang,³⁹ atau memformat ulang terhadap keadaan atau apapun yang ada, karena jauh

³⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/pidana-khusus-1.html>

³⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, tanggal 20 November 2019

dari ideal.⁴⁰ Aturan mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana korupsi yang tidak pasti perlu dirumuskan ulang agar tercipta aturan hukum yang lebih ideal. Adapun reformulasi pengaturan jangka waktu pidana kurungan pengganti (subsider) denda yang penulis harapkan yaitu aturan mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi yang semula hanya berpedoman pada KUHP yang merupakan aturan yang bersifat umum, diperbaharui dengan diaturnya batasan jangka waktu pidana kurungan pengganti denda secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembaharuan aturan mengenai batasan jangka waktu tersebut harus dilakukan dengan disertai penyesuaian terhadap nominal pidana denda yang diancamkan pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan agar aturan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan atau memiliki daya guna. Dimana asas dapat dilaksanakan merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Sehingga terdapat pedoman yang jelas bagi hakim dalam menentukan jangka waktu pidana kurungan pengganti pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi.

Selain itu, dalam melakukan pembaharuan terhadap aturan jangka waktu pidana kurungan pengganti pidana denda juga perlu memperhatikan proporsionalitas antara nominal denda dengan pidana kurungan penggantinya. Hal ini diperlukan agar pidana kurungan pengganti denda tersebut dapat berfungsi secara maksimal

sebagai alat paksa bagi terpidana untuk membayar pidana denda yang telah dijatuhkan. Jangka waktu pidana kurungan pengganti pidana denda yang tidak seimbang dengan nominal pidana denda, dalam artian jangka waktu tersebut terlalu sebentar, tentunya menyebabkan para terpidana akan selalu lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan pengganti dari pada harus membayar nestapa denda yang tinggi.⁴² Hal tersebut tentunya bertentangan dengan upaya mengoptimalkan terlaksananya pidana denda dalam rangka reorientasi sistem pemidanaan Indonesia yang masih berpusat pada pidana perampasan kemerdekaan. Kondisi ini juga akan memperburuk kelebihan kapasitas yang telah terjadi dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan teori pembaharuan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo yang menghendaki pembaharuan hukum pada hakikatnya harus memenuhi persyaratan filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis. Dirumuskannya jangka waktu pidana kurungan pengganti pidana denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat. Hal tersebut dikarenakan telah memenuhi persyaratan filosofis berupa teori, asas, fungsi, dan tujuan hukum. Dimana menurut salah satu asas yang harus ada dalam materi muatan peraturan perundang-undang yaitu asas kepastian hukum, aturan hukum haruslah dibuat secara jelas dalam bentuk tertulis. Kemudian menurut teori etis Aristoteles hukum memiliki fungsi dan tujuan semata-mata untuk mencapai keadilan.⁴³ Pembaharuan mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana korupsi yang menjadi lebih pasti, sudah sejalan dengan fungsi dan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan

⁴⁰Syafrianda, *Loc. Cit.*

⁴¹ Lihat Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴² Syaiful Bakhri, *Pidana Denda: Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Total Media, Yogyakarta, 2016, hlm 426

⁴³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 58.

keadilan, karena dengan aturan yang pasti maka akan tercipta putusan yang adil diantara para terpidana.

Reformulasi jangka waktu pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana korupsi juga telah memenuhi persyaratan yuridis, dimana batasan jangka waktu pidana kurungan pengganti denda tersebut mencerminkan adanya kepastian hukum dan dapat mencegah dicerainya hak terpidana untuk mendapatkan hak atas persamaan dimuka hukum yang dijamin oleh Konsitusi. Yang berarti reformulasi tersebut sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan diatasnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Secara politis, apabila reformulasi ini dilaksanakan, pembaharuan tersebut akan dilakukan oleh pemerintahan negara Indonesia yang merdeka. Dalam artian bukanlah hasil pemikiran negara lain atau peninggalan negara penjajah. Hal ini berarti pembaharuan aturan mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda tersebut sudah sesuai dengan persyaratan politis.

Selain itu reformulasi tersebut diatas, juga telah memenuhi syarat sosiologis atau aspirasi masyarakat. Reformulasi tersebut dapat menciptakan keseragaman putusan yang tentunya memenuhi rasa keadilan diantara terpidana yang dijatuhi nominal denda yang sama. Sebagaimana diketahui bahwa nilai keadilan sendiri merupakan salah satu ide dasar dari Pancasila. Dimana Pancasila merupakan falsafah atau pandangan hidup masyarakat Indonesia.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak terdapat batasan yang jelas dan pasti mengenai jangka waktu pidana kurungan subsider (pengganti) denda pada perkara tindak pidana korupsi di dalam hukum positif Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur bagaimana batasan mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda. Batasan jangka waktu pidana kurungan pengganti denda hanya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi batasan tersebut tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan jangka waktu pidana kurungan pengganti denda, hal tersebut dikarenakan nominal denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jauh lebih kecil dibandingkan nominal pidana denda yang diancamkan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga sering terjadi ketidakseragaman putusan yang menyebabkan terjadinya ketidak-adilan bagi para terpidana.

2. Konsep reformulasi yang ideal mengenai jangka waktu pidana kurungan subsider (pengganti) pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang ialah dengan merumuskan secara khusus batasan jangka waktu pidana kurungan subsider (pengganti) pidana denda dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang semula hanya berpedoman pada KUHP yang merupakan aturan yang bersifat umum dan tidak mampu mengakomodir nominal denda dalam perkara tindak pidana korupsi. Sehingga terdapat pedoman yang jelas dan pasti bagi hakim dalam menentukan jangka waktu pidana kurungan pengganti pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi, dan dengan demikian keadilan dan keseragaman putusan diantara terpidana yang dijatuhi dengan nominal pidana denda yang sama akan tercapai dengan baik. Konsep mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda yang terdapat dalam Undang-undang

Mata Uang dapat dijadikan contoh dalam merumuskan batasan jangka waktu pidana kurungan pengganti pidana denda Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir terjadinya ketidakseragaman putusan mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana korupsi, pemerintah harus segera memperbaharui aturan mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketidakpastian hukum tidak bisa dibiarkan terjadi secara berlarut-larut. Selain itu hak-hak terpidana sebagai warga negara sebagaimana yang diakui oleh Konstitusi haruslah terpenuhi.
2. Pembaharuan aturan mengenai batasan jangka waktu pidana harus dilaksanakan dengan disertai sinkronisasi terhadap nominal denda yang diancamkan dalam Undang-undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, agar batasan tersebut benar-benar dapat dijadikan sebagai pedoman yang pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albert Rumokoy, Donald dan Maramis Frans, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2017 *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Arief, Nawawi Barda, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful 2016, *Pidana Denda: Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Total Media, Yogyakarta.
- Darul Rosikah Cathrina, dan Marliani, Dessy Listianingsih, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Duswara Machmudin, Dudu, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gunadi, Ismu, dan Efendi, Jonaedi, 2014 *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hendra Karianga, 2013, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Jayus, 2019, *Hukum Pemilu dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Jakad Publishing, Surabaya.
- Lamintang dan Lamintang Theo, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- L Tanya, Bernard, et. al., 2010 *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Nurul Huda, Muhammad, 2012, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru.

Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Samosir, Djisman, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Prenada Media, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Adita Bakti, Bandung.

Setiady, Tolib 2010, *Pokok- Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta, Bandung.

Soeroso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2008 *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2017, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

B. Jurnal/ Skripsi/ Kamus

Gillon, Ranaan 1985, "Philosophical Medichal Ethics: Justice and Medical Ethics", *British Medical Journal*, Imperial College of Science and Technology, Londons SW7 INA, Vol. 291, 20 Juli 1985, diakses melalui <https://scholar.google.com>, tanggal 18 November 2019 diterjemahkan oleh google translate.

Johan Nasution, Bahder, 2011, "Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri, Vol 11 No.2, Januari.

Syafrianda, 2018, "Reformulasi Sanksi

Pidana Terhadap Perusahaan yang Tidak Melakukan Penerapan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Satria Palguna, Agung, dan Ketut, I Gusti, 2018 Ariawan, "Analisis Yuridis Pembebanan Uang Pengganti Terhadap Korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 4 Agustus.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, tanggal 20 November 2019

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

E. WEBSITE

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/pidana-khusus-1.html>